



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Daftar Isi	
Ringkasan Eksekutif .....	i
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Data Umum .....	3
B. Struktur Organisasi .....	4
C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis .....	6
D. Keterkaitan dengan Anggaran .....	6
BAB II Rencana Strategis .....	7
A. Rencana Strategi Organisasi .....	7
B. Pernyataan Visi .....	7
C. Pernyataan Misi .....	10
D. Tujuan Strategis .....	12
E. Sasaran dan Program Organisasi .....	13
BAB III Rencana Kinerja .....	19
Penutup.....	22

## Ringkasan Eksekutif

**P**enyusunan Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen/siklus dari SAKIP, dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 sepenuhnya mengacu dan mendukung Renstra BPKP Pusat, yang ditetapkan oleh Kepala BPKP dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja *output* yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.

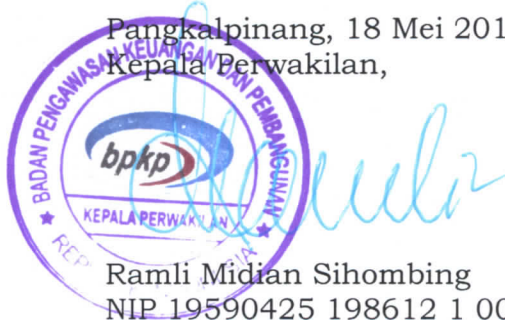
Penentuan target yang harus dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut

diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya

Dalam tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan 4 sasaran strategis dengan 5 sasaran kegiatan. Kegiatan akan diimplementasikan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan merupakan dukungan terhadap *outcome* atas kinerja BPKP Pusat.

Dengan demikian, diharapkan Renja tahun 2015 akan menjadi acuan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga pelaporan kinerja akan mudah disusun dan diukur *output* kinerjanya, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan BPKP dalam menjalankan visi dan misinya secara keseluruhan.

Pangkalpinang, 18 Mei 2015  
Kepala Perwakilan,



Ramli Midian Sihombing  
NIP. 19590425 198612 1 001

# Bab I

## Pendahuluan

Dewasa ini pelaksanaan birokrasi pemerintahan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik merupakan harapan

**Renja Tahun 2015 menyajikan target output kinerja dari aktivitas organisasi selama tahun 2015 sebagai wujud komitmen kepada pemberi amanah**

semua pihak. Peraturan telah dibuat untuk mewujudkannya antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang dimulai dengan adanya renstra sampai dengan pelaporan kinerja. Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu unit organisasi BPKP dengan melaksanakan:

- Program Teknis :
  - a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara;
  - b. Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;
  - c. Program Peningkatan Kapabilitas APIP.
- Program Generik : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis.

Program teknis tersebut dalam praktiknya akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral;
2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara;
3. Pengawasan atas penugasan presiden;
4. Pengawasan atas permintaan stakeholders;
5. Reviu LKPP;
6. Pengawasan penerimaan negara;
7. Pengawasan PHLN;
8. Assesment, Evaluasi GCG, KPI, MR;
9. Pengawasan Investigatif;
10. Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan;
11. Penyusunan Pedoman SPIP;
12. Sosialisasi SPIP;
13. Diklat SPIP;
14. Bimbingan Teknis SPIP.

Adapun program generik dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana;
2. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi;
3. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah;
4. Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan;
5. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan;
6. Pendidikan dan pelatihan pengawasan;
7. Penelitian dan pengembangan pengawasan;
8. Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah/Presiden dan Internal BPKP;
9. Pembinaan JFA dan tata kelola APIP;
10. Fasilitas dukungan manajemen Perwakilan BPKP;
11. Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana;

Renja tahun 2015 ini merupakan uraian lebih lanjut dan rinci dari Renstra tahun 2015 – 2019 yang telah disusun. Renstra yang merupakan rencana umum lima tahunan, diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Renja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra beserta strategi pencapaiannya.

#### **A. Data Umum**

Organisasi dan tata kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014. Perwakilan BPKP dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Perwakilan BPKP mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan SPIP pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan pengurusan barang milik/kekayaan pemda atas permintaan daerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
7. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD;
8. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan pemangku kepentingan serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
12. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kepala Perwakilan, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha terdiri atas Subbagian Kepegawaian dan Umum serta Subbagian Keuangan. Adapun Kelompok Jabatan



Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Lainnya.

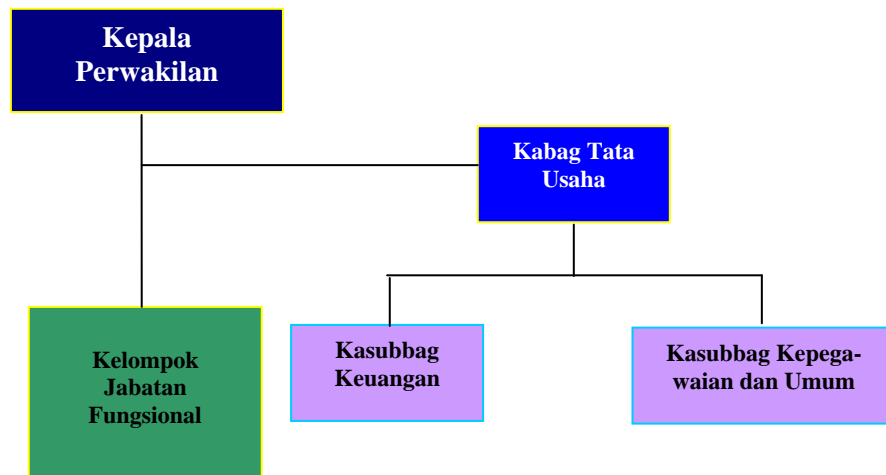
Kelompok JFA terdiri atas:

1. Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP);
2. Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD);
3. Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara (AN);
4. Kelompok JFA Bidang Investigasi;
5. Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3APIP).

Dukungan sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas:

<b>Uraian Jabatan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Pejabat Struktural	4
Pejabat Fungsional Auditor	63
Pegawai Administrasi	4
<b>Jumlah</b>	<b>71</b>

### **Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



### **C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis**

Keterkaitan antara Renstra dan Renja sebagai berikut:

1. Renstra menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi, sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran tahunan.
2. Adapun Renja merupakan dokumen lebih lanjut yang lebih detail dan terfokus. Renja ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam satu tahun.

### **D. Keterkaitan dengan Anggaran**

Keterkaitan antara Anggaran dan Renja sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja, dan juga Renstra, tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran.
2. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

## Bab II

# Rencana Strategis

### A. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-2019 sepenuhnya mengacu dan mendukung

**Renstra tahun 2015 - 2019 dijadikan sebagai dasar pedoman seluruh aktivitas organisasi dan sebagai dasar bagi penyusunan Renja Tahun 2015**

renstra yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPKP. Renstra tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran.

BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kompetensi yang mumpuni dipercaya oleh Presiden untuk membantu dan menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian BPKP adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional.

### B. Pernyataan Visi

Pernyataan Visi mengacu pada hasil Rapat Pimpinan BPKP, yang telah menyepakati Visi, Misi dan Values BPKP sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Visi BPKP adalah:

**Auditor Internal Pemerintah RI  
Berkelas Dunia untuk Meningkatkan  
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  
dan Pembangunan Nasional**

Pernyataan visi tersebut di atas pada hakikatnya merupakan penegasan jati diri BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden

serta menggambarkan peran dan manfaat BPKP bagi Presiden ataupun *stakeholders* lainnya.

Pernyataan visi tersebut juga merupakan penegasan bahwa BPKP harus menjadi *world class auditor*, sesuai dengan visi pemerintah yang menghendaki Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkelas dunia. Hal ini penting karena fokus APIP saat ini adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, mengawal proses pembangunan, mengawal peningkatan ruang fiskal, menetapkan *governance system*, mengawal aset negara dan daerah, serta membangun kapasitas informasi yang mendukung berupa teknologi informasi, sumber daya manusia, dan proses bisnis.

Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh BPKP Pusat yang diharapkan menjadi kata kunci yang dapat mengilhami seluruh staf BPKP dalam memaknai visi dan misi BPKP yang baru, nilai-nilai luhur tersebut adalah: **P I O N I R**

<b>P</b>	: Profesional
<b>I</b>	: Integritas
<b>O</b>	: Orientasi pada Pengguna
<b>N</b>	: Nurani dan Akal Sehat
<b>I</b>	: Independen
<b>R</b>	: Responsibel

**Profesional:** profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, kepatuhan pada standar profesi dan kode etik ataupun ketentuan perundang-undangan

**Integritas:** kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuen.

**Orientasi pada pengguna:** spirit kewirausahaan.

**Nurani dan Akal Sehat:** Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, minimalisasi distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional.

**Independen:** independen dalam sikap dan penampilan.

**Responsibel serta akuntabel:** *Obligation to act – obligation to answer*, kewajiban untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta menjelaskan/menjawab apa yang telah dilaksanakan.

Selain Nilai luhur yang menjadi tumpuan dalam berkinerja, sejalan dengan arahan Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa memegang teguh prinsip “5 AS” dalam bekerja. Prinsip ini diharapkan dijiwai oleh seluruh insan BPKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Prinsip tersebut adalah:

### 1. **Kerja Cerdas**

Bekerja cerdas memiliki makna menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensinya dalam melaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis substantif semata tetapi juga secara emosional dan spiritual. Dalam situasi menumpuknya beban kerja, pegawai Perwakilan BPKP dapat menentukan prioritas penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dan hasil kerja yang diharapkan. Pemikiran lain dalam memaknai kerja cerdas adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif dengan alokasi waktu kerja yang sama atau dengan menggunakan peralatan yang sama.

### 2. **Kerja Berintegritas**

Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memegang teguh prinsip integritas dalam bekerja. Prinsip atau nilai ini mengandung makna bahwa bekerja berlandaskan pada kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuensi. Kelima unsur dalam integritas tadi mendorong pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan integritas maka pegawai yang memiliki kepintaran atau banyak “akal” tidak terjebak dalam sikap dan cara pandang untuk “*minteri*” atau “*ngakali*”.

### 3. **Kerja Keras**

Kerja keras adalah kebalikan dari sifat malas. Prinsip ini merupakan salah satu kunci dari hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras dalam arti harfiah, yaitu bekerja sekeras mungkin, hal ini tentu saja

tidak cukup. Sehingga kerja keras mesti dibarengi dengan pemanfaatan ilmu, sehingga bekerja keras dengan segenap kemampuan yang dimiliki dan tidak mudah pasrah atau kalah sebelum bertanding.

#### 4. **Kerja Tuntas**

Tuntas memiliki makna selesai atau paripurna. Oleh karena itu prinsip ini mendorong pegawai BPKP untuk senantiasa bekerja dengan tuntas sampai selesai dan tidak setengah-setengah. Ketuntasan ini sangat diperlukan dalam mewujudkan peran BPKP yang berorientasi pada pengguna.

#### 5. **Kerja Ikhlas**

Ikhlas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keluh kesah dan sumpah serapah, padanan dalam bahasa Jawa adalah “*legowo*”. Pegawai BPKP diharapkan bekerja dengan *ikhlas di tempat kerja manapun, jenis pekerjaan apapun*, sekalipun di luar jam kerja. Hal ini dijadikan prinsip agar Pegawai BPKP senantiasa siap dengan berbagai bentuk penugasan dan ditempatkan pada unit kerja BPKP di Seluruh Indonesia. Dengan demikian apapun yang datang pada kita, menyenangkan atau tidak, kita terima dengan *legowo*.

Perumusan visi BPKP selain mempertimbangkan nilai luhur dan prinsip dalam bekerja, juga diarahkan untuk mengakomodasi domain BPKP dalam pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara.

### **C. Pernyataan Misi**

Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (*value added*) melalui dua peran yaitu aktivitas *assurance* dan *consulting*. Adapun misi BPKP adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif;

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif; dan
3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Ketiga misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Ketiganya pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat dari keberadaan BPKP bagi *stakeholders*-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas internalnya.

**Misi Pertama** berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah yang merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden. Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasi Presiden selaku *shareholder* BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas bagi BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja program Pemerintah dan mewujudkan iklim yang mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini berkaitan erat dengan fungsi utama auditor internal di bidang *good governance*, pengelolaan risiko dan penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna mengamankan aset serta mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan sejak dini.

**Misi kedua** berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingan dan konsultasi SPIP. Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatan implementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Sebagai pembina,

BPKP juga harus mampu memberikan contoh atas penerapan implementasi SPIP.

**Misi ketiga** berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP yang meliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal.

#### **D. Tujuan Strategis**

Tujuan strategis memuat secara jelas arah yang akan dituju atau diinginkan oleh organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan **misi** yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan strategis ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut juga akan memungkinkan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan strategis dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.



## **E. Sasaran dan Program Organisasi**

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merumuskan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode tahunan melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkan dalam Renja (*Performance Plan*).

Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi setiap tahun dalam kurun waktu 5 lima tahun.

Sasaran strategis juga merupakan bagian integral dari renstra untuk mengendalikan pencapaian kinerja agar pelaksanaan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh dapat lebih sukses. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai.

Masing-masing sasaran yang ditetapkan didukung dengan program yang terkait. Program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan program Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Tujuan (1)**

Untuk mencapai tujuan “**(1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif**”, sasaran dan indikator kinerja *output* yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tujuan 1	Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Sasaran Program 1	Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan
Rincian IKK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan</li> <li>2. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola</li> <li>3. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi</li> <li>4. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah</li> <li>5. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan</li> <li>6. Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan</li> <li>7. Rekomendasi Keinvestigasian</li> <li>8. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L</li> <li>9. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda</li> <li>10. Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi</li> <li>11. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi</li> </ol>

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan Misi-1 “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif”, yang secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP sampai dengan tahun 2019, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis, yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.

Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP).

Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan level *assurance* BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang akuntabel mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

## Tujuan (2)

Untuk mencapai tujuan **“(2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”**, sasaran dan indikator kinerja *output* yang ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada
Sasaran Program 2	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatkan Upaya Pencegahan Korupsi
Sasaran Kegiatan 2	Tersedianya Informasi Penyelenggaraan SPIP
IKK 2.1	Jumlah Rekomendasi Hasil SPIP
Rincian IKK 2.1	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program
IKK 2.1	Jumlah Rekomendasi Hasil SPIP
Rincian IKK 2.2	1. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L 2. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan Misi-2 “Membina penyelenggaraan SPIP yang efektif”, yang secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (KLPK), serta Program Prioritas Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritas pembangunan nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK sampai dengan tahun 2019, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.

### **Tujuan (3)**

Untuk mencapai tujuan **“Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten”**, sasaran dan indikator kinerja *output* yang ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 3	Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
Sasaran Program 3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
IKK	Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
Rincian IKK	1. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern 2. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan Misi-3 “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”, yang perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/P)”.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/P” oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP K/L/P sampai dengan tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas

APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

## Bab III

# Rencana Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

**Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan sebagai dasar perhitungan capaian kinerja dari 4 sasaran strategis**

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk:

- ✓ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- ✓ Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- ✓ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- ✓ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- ✓ Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Rencana kinerja (Renja) tahun 2015 merupakan implementasi Renstra tahun 2015-2019 untuk mendukung **4 sasaran strategis**. Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
<b>Output:</b> Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara	Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan	6 Rekomendasi	361.185.000
	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara	2 Rekomendasi	261.250.000

<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA OUTPUT</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi	12 Rekomendasi	296.770.000
	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah	7 Rekomendasi	236.396.000
	Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi	22 Rekomendasi	438.165.000
	Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan	1 Rekomendasi	28.016.000
	Rekomendasi Keinvestigasian	24 Rekomendasi	305.722.000
	Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L	3 Rekomendasi	112.270.000
	Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi	14 Rekomendasi	282.394.000
	Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi	1 Rekomendasi	333.324.000
<b>Output:</b> Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatkan Upaya Pencegahan Korupsi	Jumlah Rekomendasi Hasil SPIP	1 Rekomendasi	171.430.000
<b>Output:</b> Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/p	Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P	1 Rekomendasi	149.723.000
<b>Output:</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	61 Laporan	14.885.225.000
	Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan BPKP	50 m <sup>2</sup>	



<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA OUTPUT</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Tersedianya Alat Pengolah Data BPKP	79 Unit	
	Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP	130 Unit	
	Pematangan Lahan Pembangunan Kantor Perwakilan BPKP	4.000 m <sup>2</sup>	
Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP			<b>3.045.182.000</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis			<b>14.885.225.000</b>
Jumlah Anggaran			<b>17.930.407.000</b>

### **Target Kinerja 2015**

Renja tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Renja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan. Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2015 (terlampir).

## Penutup

**R**enja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 merupakan dokumen dari Renstra periode 2015-2019 yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, yang dimulai dari Renstra, Renja, Perkin, dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Renja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja dari kegiatan, berupa *input* dan *output*, dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Dalam tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan 4 Sasaran Strategis dengan target 96 *output* utama.

Beberapa kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebagian kegiatan lainnya dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan instansi penyidik (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian), serta berupaya untuk bersinergi dengan instansi pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten), dan juga dengan pihak lain yang terkait.

**Target Kinerja Tahun 2015**

**Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Outcome	Target Output
1		2		3	4	5	6	7	4	5
					Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
A	Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara	Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara		%					40	
	A.1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Perbaikan Tata Kelola	A.1.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	19	28	33	12		92
B	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi	Persentase Penerapan Unsur SPIP/pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi Secara Mendasar		%					50	
	B.1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah	B.1.1	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	-	1	1	-		2
C	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P	Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)		%					-	
	C.1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Peningkatan Kapabilitas APIP	C.1.1	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rekomendasi	1	1	-	-		2
D	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan	Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan		Skala likert 1-10					7	
	D.1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	D.1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	20	12	16	13		61
	D.2 Termanfaatkannya Aset Secara Optimal dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesetmaan	D.2.1	Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan BPKP	m2	-	-	-	50		50
		D.2.2	Tersedianya meubelair Perwakilan BPKP	Unit	-	-	-	-		-
		D.2.2	Tersedianya Alat Pengolah Data BPKP	Unit	1	14	24	40		79
		D.2.3	Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP	Unit	23	-	-	107		130
		D.2.5	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	Unit	-	-	-	-		-
		D.2.6	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP	Unit	-	-	-	-		-
D.2.4	Pematangan Lahan Pembangunan Kantor Perwakilan BPKP	m2	-	-	-	4.000		4.000		

\*catatan: Target Pembinaan APIP Pemda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai level 2 pada tahun 2015